

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI DAN NON-TUNAI DI KELURAHAN TANJUNG SENANG

NAMA : TRI PUTRI AYU NINGSIH

NPM :2216041137

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan saat ini menjadi penghambat utama dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia, karena masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada bulan September tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa, sementara pada bulan September tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,79 juta jiwa.

Terdapat dua strategi utama dalam upaya mengurangi kemiskinan. Pertama, adalah melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka dalam berbagai bidang. Kedua, adalah memberikan pelatihan kepada mereka agar memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mencegah terjadinya kemiskinan yang baru. Tujuan dari upaya pengentasan kemiskinan ini adalah untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Royat, 2015).

Setelah mengalami pandemi Covid-19 peristiwa ini menjadi salah satu dampak yang mempengaruhi berbagai aspek, dari sosial, ekonomi, sampai keuangan, selain berdampak pada kesehatan masyarakat. Salah satu dampak sosial yang terlihat jelas adalah meningkatnya jumlah pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ini disebabkan karena berhentinya berbagai kegiatan ekonomi yang biasanya melibatkan banyak tenaga kerja, termasuk sektor informal. Selain itu, data mengenai penerima bantuan kemiskinan dari pemerintah saat ini masih belum akurat karena proses pemilihan penerima bantuan masih dilakukan secara manual dan didasarkan pada perkiraan beberapa faktor, tanpa mempertimbangkan kriteria tertentu.

Pada dasarnya, kebutuhan utama atau kebutuhan dasar manusia meliputi sandang, pangan, dan papan. Ini berarti seseorang dianggap sejahtera ketika ia memiliki pakaian yang mencukupi untuk digunakan sehari-hari, makanan dan minuman yang cukup untuk mendukung aktivitas sehari-hari, karena manusia membutuhkan asupan makanan dan energi untuk menjalankan kehidupannya dan bertahan hidup, serta tempat tinggal (papan) sebagai tempat berlindung. Kesejahteraan selalu menjadi harapan setiap individu dalam kehidupannya. Seseorang dianggap sejahtera ketika semua kebutuhannya terpenuhi melalui upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut. Tiga aspek yang sudah dijelaskan tadi harus terpenuhi agar mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”.

Banyak sekali cara dan program yang pemerintah memberikan agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan, mulai dari program bantuan sosial tunai maupun non-tunai, yang bertujuan memberikan dukungan kepada keluarga dan individu yang memerlukan. Program bantuan sosial ini merupakan instrumen kebijakan yang esensial bagi pemerintah dalam usahanya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam usaha meningkatkan pemulihan ekonomi di wilayah-wilayah yang terdampak oleh pandemi penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) lalu, pemerintah memberikan bantuan kepada daerah melalui transfer dana dan pengiriman bahan pangan. Bentuk dukungan pemerintah ini diberikan kepada daerah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai dan Pangan Non-Tunai, yang sering disingkat sebagai BLT dan BPNT.

Bantuan sosial tunai melibatkan transfer uang langsung kepada penerima, sementara bantuan sosial non-tunai dapat mencakup berbagai jenis bantuan, seperti makanan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan. Tujuan utama dari keduanya adalah meningkatkan kesejahteraan penerima, mengurangi ketidaksetaraan, serta mencapai pembangunan sosial yang lebih inklusif.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan suatu program bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang dapat berupa pemberian uang tunai atau jenis

bantuan lainnya, baik yang bersyarat maupun yang tidak bersyarat, yang ditujukan untuk masyarakat yang berada dalam kondisi miskin. Program BLT pertama kali diperkenalkan oleh Brasil dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Besarnya bantuan dan mekanisme pelaksanaan BLT bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah di setiap negara.

Program BLT biasanya diimplementasikan sebagai respons terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pasar dunia pada saat itu. Tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat yang berada dalam kondisi miskin agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Bantuan ini merupakan komponen utama dari sistem jaring pengaman sosial di negara-negara maju, mencakup sekitar 80% dari seluruh populasi di negara-negara industri, seperti yang tercatat dalam data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO). Namun, di negara-negara berkembang, program bantuan tunai masih sangat terbatas, dan pemberian bantuan dalam jumlah yang sangat kecil. Program-program semacam itu hanya mencakup sekitar 10% angkatan kerja di wilayah Asia dan Afrika, sekitar 15-60% angkatan kerja di Amerika Latin, dan sekitar 20-25% angkatan kerja di negara-negara Afrika Utara yang memiliki tingkat pendapatan menengah.

Dalam hal pengeluaran publik, sebagian besar negara berkembang hanya mengalokasikan kurang dari 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka untuk program transfer tunai, sementara negara-negara di Eropa Barat rata-rata mengeluarkan lebih dari 10% dari PDB mereka untuk program serupa.

Program BLT telah berjalan sejak kasus Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia. Bantuan tunai ini ditujukan kepada penduduk di luar wilayah Jabodetabek. Program ini memberikan uang tunai sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat selama tiga bulan, yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni. Tiga wilayah akan menerima bantuan sosial tunai ini. Program ini telah diperpanjang karena masih ada dampak dari pandemi Covid-19 yang berlanjut.

Menurut Wibawa (2020:76), indikator keberhasilan dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka mengkompensasi pengurangan subsidi BBM adalah sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

2. Mencegah penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Pemerintah memberikan bantuan tunai ini dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang belum menerima bantuan dari program lain menjadi prioritas. Tujuan umum dari BLT adalah mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan mengubah perilaku RTS yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Kriteria penerima BLT sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya dirancang untuk saling mendukung dengan program jaringan pengaman sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, atau Kartu Pra Kerja, tanpa ada tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Pemberian BLT Desa kepada warga harus mematuhi syarat bahwa penerima bantuan tersebut adalah keluarga yang masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu, dan mereka berdomisili di desa yang bersangkutan.

Penerima BLT Desa harus dipilih secara eksklusif, yang berarti mereka tidak boleh termasuk dalam daftar penerima bantuan dari program lain seperti PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), atau program bantuan sosial pemerintah lainnya.

Bantuan sosial tunai ini dalam konsepnya, bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu yang tidak mampu dan terpinggirkan dalam masyarakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Bantuan sosial dapat bersifat sementara dalam situasi-situasi tertentu seperti bencana, resesi ekonomi, atau kebijakan pemerintah yang khusus. Selain itu, ada bantuan sosial yang bersifat tetap, terutama untuk penduduk yang memiliki kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak yang terlantar. Jadi manfaat dari bantuan sosial ini yaitu untuk menjaga masyarakat dari risiko sosial yang ada, sehingga mereka dapat tetap menjalani hidup dengan martabat sebagai manusia.

Disisi lain pemerintah juga membuat program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT ini menjadi suatu bentuk bantuan sosial juga, namun bantuan berbentuk pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan. Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai disalurkan dan dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang telah memiliki infrastruktur yang memadai. Dengan berangsur-angsur,

program bantuan pangan ini akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sejalan dengan kesiapan sasaran penerima dan kemampuan infrastruktur non tunai yang tersedia. Selain itu, sejak tahun 2018, subsidi rastra juga telah diubah menjadi bantuan sosial dalam bentuk non tunai. Oleh karena itu, bantuan sosial yang disalurkan di berbagai kabupaten dan kota kini diberikan dalam bentuk non tunai, meskipun beberapa daerah masih memberikan rastra tanpa biaya tebus kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

BPNT merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang signifikan yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dalam mengurangi beban pengeluaran mereka terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hjelm et al. (2016) dan Sakyi (2012), rumah tangga yang berada dalam kategori miskin memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kesulitan dalam mengakses pangan karena keterbatasan pendapatan dan faktor-faktor lainnya jika dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak miskin.

Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan di pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Penyalur, yang sering disebut sebagai E-warong. Salah satu keunggulan utama dari bantuan sosial pangan non tunai ini adalah efisiensi dalam penggunaannya oleh penerima manfaat. Mereka dapat mengoptimalkan penggunaan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka, yang pada akhirnya dapat memberikan dorongan positif terhadap kondisi ekonomi mereka.

Selain itu, melalui mekanisme ini, terjadi pula inklusi keuangan bagi fakir miskin dengan mengaktifkan kembali peran lembaga perbankan. Hal ini membantu menghindari sejumlah masalah inefisiensi dan ketidakefektifan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya. Namun, implementasi bantuan pangan non tunai ini juga memerlukan manajemen yang lebih baik untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak hanya berlaku bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp 110.000 per bulan, yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan menggunakan KKS, KPM dapat membeli berbagai kebutuhan pangan seperti beras, gula, tepung, minyak goreng, dan lainnya melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi. KKS elektronik juga dilengkapi dengan sistem Saving account dan e-Wallet/dompot elektronik, yang memungkinkan KPM menyimpan dan menggunakan kembali dana bantuan sosial jika tidak habis dalam satu bulan.

Pada awal pelaksanaan program BPNT, dukungan anggaran mencapai Rp1,70 triliun untuk 1,29 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2019, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp20,80 triliun untuk 15,60 juta KPM. Anggaran ini setara dengan lebih dari 21% dari total anggaran kedaulatan pangan nasional dan hampir 35% dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).

Salah satu tujuan utama dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah mengurangi beban biaya makanan bagi masyarakat serta memberikan nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Hal ini telah diatur dalam PERPRESRI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

Manfaat dari bantuan sosial pangan non tunai adalah bahwa penerima manfaat dapat memanfaatkannya dengan cara yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini, pada gilirannya, dapat memberikan dorongan positif terhadap ekonomi mereka, mengaktifkan inklusi keuangan bagi masyarakat miskin melalui peran yang diperbaharui dari lembaga perbankan, dan mencegah insiden-insiden inefisien dan tidak efektif yang pernah terjadi dalam penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya. Namun, perubahan ini memerlukan manajemen yang baru.

Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, serta untuk mendorong inklusi keuangan, Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk melaksanakan bantuan sosial dan subsidi secara non tunai dalam sebuah rapat terbatas tentang keuangan inklusif pada tanggal 26 April 2016. Penyaluran bantuan sosial non tunai melalui sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima manfaat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program, sehingga mempermudah pengawasan, pemantauan, dan pengurangan penyimpangan. Inilah yang menjadi landasan bagi sistem manajemen yang baru.

Selanjutnya, terjadi perubahan dari program beras sejahtera (Rastr) yang kini dilakukan melalui e-voucher (kupon elektronik), sehingga penyaluran dapat lebih tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. E-voucher ini digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras dan bahan pangan bergizi seperti telur sesuai dengan jumlah dan kualitas yang mereka inginkan.

Dalam hasil penelitian Sofi, I. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dapat

meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi. Namun, penting untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terlebih dahulu agar semua yang berhak menerima bantuan dari pemerintah dapat menerima bantuan tersebut. Dan hasil penelitian Iwan Hermawan, S. P., Izzaty Izzaty ST, M. E., Budiyantri, E., Rafika Sari, S. E., Sudarwati, Y., IP, S., ... & Sos, S. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT di Kota Yogyakarta sudah efektif, namun dengan beberapa catatan. Efektivitasnya berdasarkan terpenuhinya sebagian besar indikator 6T yaitu, tepat harga, jumlah, waktu, kualitas, dan manfaat.

Di Kota Bandar Lampung, program bantuan sosial tunai menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Evaluasi program ini menjadi esensial karena kesuksesannya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut sangat bergantung pada tingkat kepuasan masyarakat penerima bantuan.

Bantuan sosial, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, telah menjadi komponen integral dalam upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Indonesia. Pentingnya evaluasi yang teliti terhadap efektivitas dan efisiensi program ini tercermin dalam alokasi dana yang signifikan yang dialokasikan untuknya. Evaluasi objektif seperti pendekatan kuantitatif menjadi alat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan oleh pemerintah memberikan manfaat maksimal kepada penerima bantuan.

Kriteria utama untuk mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bagi individu yang tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebelumnya, telah ada penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentang isu bantuan sosial, namun mayoritas dari penelitian tersebut tidak secara khusus membahas implementasi bantuan sosial ini.

Masyarakat telah merasakan manfaat dari bantuan sosial tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa data yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan penerima bantuan sosial dapat memiliki potensi kesalahan sasaran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang, menurut informasi dari operator di tingkat kelurahan, belum pernah melalui proses verifikasi dan validasi. Selama ini, validasi dan verifikasi hanya berfokus pada

Bantuan Sosial Pangan (BSP). Operator kelurahan menyatakan bahwa data dalam DTKS sudah tidak lagi akurat, dengan contoh kasus masih ada warga yang sudah meninggal atau pindah namun masih terdaftar dalam DTKS. Selain data dari pemerintah pusat, data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) juga berasal dari usulan yang diajukan oleh tingkat RT/RW.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam dampak positif antara program bantuan sosial tunai dan non-tunai terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung?
2. Apakah program bantuan sosial tunai lebih efektif daripada program bantuan non-tunai dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, atau malah sebaliknya?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas program bantuan sosial tunai dan non-tunai terhadap tingkat kepuasan penerima bantuan di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

- Mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan yang signifikan dalam dampak positif antara program bantuan sosial tunai dan non-tunai terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.
- Membandingkan efektivitas program bantuan sosial tunai dan non-tunai dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung untuk menentukan apakah salah satu program lebih efektif atau tidak, serta menganalisis faktor-faktor yang mungkin memengaruhi efektivitasnya.
- Menilai tingkat kepuasan penerima bantuan sosial tunai dan non-tunai di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan menganalisis pengaruh efektivitas program bantuan terhadap tingkat kepuasan mereka, dengan tujuan memahami sejauh mana program-program tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan penerima bantuan.

D. Manfaat Penelitian

- Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan organisasi terkait dalam merancang kebijakan bantuan sosial yang lebih efektif lagi. Dengan memahami perbedaan antara program bantuan tunai dan non-tunai, mereka dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam alokasi sumber daya.
- Penelitian ini dapat membantu pihak yang mengelola program bantuan sosial untuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing jenis program. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas program-program tersebut.
- Dengan memahami dampak positif dari program bantuan sosial, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tanjung Senang. Dengan demikian, penduduk setempat dapat merasakan manfaat nyata dari program-program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumdani, N., Nanda Rahmania, S., Nafi, Z., dan Tukiman Program Studi Administrasi Publik, ah, Upn, F., & Timur, J. (2021). *EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLTDD) DI DESA MOJORUNTUT KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO*. 2(5).
- Dinarila Balqis, A. S., Iskatinah, I., & Hariadi, W. (2020). PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BERDASARKAN PERMENSOS RI NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 172–182. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.133>
- Djako, P., Panigoro, M., & Sudirman, S. (2022). PENGARUH PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN MOODU KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO. *Jambura : Economic Education Journal*, 4(2), 196–207. <https://doi.org/10.37479/jeej.v4i2.15957>
- Fadlurrohman, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (STUDI KASUS DI KOTA CIMAHI). *Share : Social Work Journal*, 9(2), 122. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>
- Hermawan, S. P., M. S. Dr. I., Izzaty S.T., M. E., I., Budiyan, S. Si., M. S. E., E., Sari, S. E., M. S. E., R., Sudarwati, S. IP., M. Si., Y., & Teja, S. Sos., M. Si., M. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 131–145. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2237>
- Julianto, P. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI. *Qawwam : The Leader's Writing*, 1(1), 38–43. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i1.77>
- Mufida, N. (2021). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Sosial Sains*, 1(2), 82–92. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i2.23>
- Sabarisman, M., Rahardianto, D., & Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Indonesia). (n.d.). *Ketepatan sasaran dan nilai kemanfaatan bantuan sosial sembako di Jabodetabek*.
- Sofi, I. (2021). EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI DESA. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Susanto, B. (n.d.). *Bantuan sosial tunai Kementerian Sosial bagi keluarga terdampak COVID-19*.
- Vita Ferezagia, D. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. In *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* (Vol. 1, Issue 1).